

**KEKERASAN STRUKTURAL PADA JURNALIS FILIPINA PASCA
PEMBANTAIAN MAGUINDANAO 2009-2020**

SKRIPSI



oleh :

Rizal Shodiq Hartono

19323255

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**KEKERASAN STRUKTURAL PADA JURNALIS FILIPINA PASCA
PEMBANTAIAN MAGUINDANAO 2009-2020**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh Derajat
Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Rizal Shodiq Hartono

19323255

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

ABSTRAK

KEKERASAN STRUKTURAL PADA JURNALIS FILIPINA PASCA PEMBANTAIAN MAGUINDANAO 2009-2020

Oleh :

Rizal Shodiq Hartono

Penelitian ini berangkat dari fenomena budaya kekerasan politik di lingkungan pemberitaan Filipina. Secara khusus menyinggung tragedi Maguindanao 2009 yang menelan banyak korban sipil termasuk banyak jurnalis. Yang mana peristiwa tersebut menjadi yang terburuk juga menyinggung hak asasi manusia mulai bahkan hingga peradilanannya. Motif politik yang kental membawa penelitian ini dan mencoba menganalisa pasca insiden tersebut, bagaimana budaya kekerasan politik terhadap jurnalis apakah masih relevan. Dengan merefleksikan sejarah serta statistik kejadian demi kejadian dalam kurun waktu 2009-2020, adanya sistem terstruktur yang membuat kekerasan makin terpupuk.

Teori kekerasan oleh Johan Galtung dapat mbingkai fenomena yang disebut sebagai kekerasan struktural. Kekerasan politik yang sudah mengakar sejak lama juga dijalankan oleh elit dan aktor politik, dan disangga oleh apa yang disebut klan dinasti. Impunitas dan vigilantisme mewakili adidaya untuk sebuah tujuan politik, sebagai produk dari budaya dan kekerasan struktural dimana hal tersebut harus mengesampingkan urusan pihak lain. Rappler dan ABS CBN, jurnalis terhimpit diantara persaingan politik yang sampai tak memberi mereka ruang untuk advokasi. Penelitian ini berupaya untuk memetakan kekerasan struktural tersebut.

Kata Kunci : *maguindanao, kekerasan politik, jurnalisme, kekerasan*

HALAMAN PENGESAHAN

**KEKERASAN STRUKTURAL PADA JURNALIS FILIPINA PASCA
PEMBANTAIAN MAGUINDANAO 2009-2020**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 2 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 3 Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A..

Tanda Tangan

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Karina]

[Handwritten signature: Hangga Fathana]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 29 Mei 2023

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '2E61DAKX484301321'.

Rizal Shodiq Hartono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR DAN FIGUR	vii
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	13
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
MEDIA DAN POLITIK DI FILIPINA	17
2.1 Posisi Media dalam Sistem Sosial Politik di Filipina	18
2.2 Pembunuhan dan Serangan yang Bersifat Politis	22
2.3 Faktor yang Mempengaruhi Bagaimana Jurnalis Menjadi Profesi yang Rentan akan Kekerasan	29
BAB III	35
ANALISIS KEKERASAN DAN PEMETAAN KEKERASAN STRUKTURAL	35
TERHADAP JURNALIS FILIPINA	35
3.1 Impunitas dan Vigilantisme Polisi	36
3.2 Bagaimana Filipina Memahami Kekerasan	40
3.3 Kekerasan dan Kekuasaan (Mencederai Kebutuhan atas Hidup dan Kebutuhan atas Kebebasan)	45
3.4 Kekerasan Langsung (Direct Violence)	49
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Rekomendasi	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR DAN FIGUR

Gambar 1. Skema Segitiga Kekerasan Johan Galtung	12
Gambar 2. Statistik Insiden Politisi Tahunan di Wilayah Filipina Selatan 2016-2019	23
Gambar 3. Grafik jumlah jurnalis Filipina yang terbunuh dari tahun 2000 sampai dengan 2020 laporan dari RSF	26
Gambar 4. Jumlah jurnalis Filipina yang terbunuh selama bertugas versi laporan dari UNESCO.	27
Gambar 5. Rasio status kasus pembunuhan jurnalis di Filipina dari tahun 2006 hingga 2022 dihimpun oleh UNESCO.	28
Gambar 6. Tingkat Kepercayaan Jurnalis Filipina pada Institusi dan Lembaga Sumber	33
Gambar 7. Skema Sederhana Budaya Kekerasan Filipina.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bicara dalam konteks kekerasan, Pembantaian Maguindanao yang terjadi 13 tahun silam ini menewaskan puluhan wartawan serta sipil yang terlibat. Kasus ini nampak sangat kental akan kekerasan di dalamnya. Bermula dari ketegangan politik di satu wilayah di Filipina yakni kota Ampatuan, ketika pemilu hendak berlangsung disana dan menyisakan calon terpilih antara Esmael Toto Mangudadatu melawan kandidat kuat Datu Andal Ampatuan Jr. Keluarga ampatuan yang memang secara terstruktur menguasai kota tersebut harus mendapat lawan politik yang cukup mengkhawatirkan. Esmael Toto memperoleh banyak dukungan dari masyarakat setempat hingga mengkhawatirkan serta menggoyahkan kepercayaan diri Ampatuan untuk berkuasa kembali di periode mendatang. Karena ada skeptis tersebut maka terjadi pembantaian brutal yang dalam hal ini dilakukan oleh kubu ampatuan yang menghabisi kubu Esmael Toto. (Perez, 2009)

Ampatuan mengirimkan pasukan bersenjata dan melakukan blokade pada rombongan pendukung Toto yang termasuk didalamnya puluhan wartawan serta keluarga Toto. Saat itu Mangudadatu mengirim istrinya, dua saudara perempuan, dan puluhan awak media untuk mendaftar atas nama dirinya. Kiranya, kelompok militan tak akan tega menyakiti perempuan. Tadinya rombongan ini akan berangkat ke kantor pemilu setempat untuk mencalonkan Esmael Toto dalam pemilihan walikota nanti.

Rombongan pendukung Toto beserta banyak wartawan di dalamnya di serang secara membabi buta hingga menewaskan 58 orang. Tindakan kebrutalan kelompok bersenjata ini tidak hanya sampai disitu saja, pasca memastikan semua yang di dalam mobil rombongan tersebut tewas mereka menguburkan para korban dengan cara mengubur mereka dengan alat berat dan memasukkannya ke dalam tanah bersamaan juga dengan mobil sebagai saksi bisu. Hingga kasus ini terkuak bahwa dalang dibalik pembantaian ini adalah pihak Ampatuan, perundungan tetap datang pada pihak Esmael Toto dan sulit memperoleh keadilan. (Gregorio & Santos, 2019)

Kasus pembunuhan besar yang terjadi di 2009 tersebut baru ditetapkan vonis hukuman bagi tersangka dalang dibalik pembantaian setelah 10 tahun berlalu. Tepatnya pada bulan desember tahun 2019, Pengadilan Manila baru saja mengeluarkan putusan atas kasus pembantaian konvoi politik di Provinsi Maguindanao tersebut. Pembunuhan berencana ini di penghujung kasusnya masih menyisakan pertanyaan serta ketidakpuasan publik khususnya dari Esmael Toto sendiri yang padahal ia sebagai target utama awalnya. Pengadilan juga menetapkan 14 polisi lokal dan personel milisi Ampatuan dihukum 8–10 tahun atas tuduhan kaki tangan pembunuhan tersebut. Keterlibatan elemen polisi lokal dalam pembantaian konvoi politik dapat diterjemahkan sebagai kegagalan sistem dan ada hal yang perlu dibenahi. Dengan jumlah korban jiwa, kebrutalan pembunuhannya hingga proses peradilanannya. (“Ten Years for Justice in Maguindanao Case Is Too Long,” 2019)

Kekerasan fisik, mental, dan emosional dialami di hampir setiap jurnalis di seluruh dunia baik online maupun offline sebagai akibat dari melakukan pekerjaan mereka. UNESCO mencatat pekerjaan jurnalis media termasuk dalam kategori yang

banyak menerima tindak kekerasan pada lingkup profesional. Pembantaian Maguindanao 2009 merupakan satu dari sekian banyaknya peristiwa penyerangan pada media, pers atau jurnalis. Melansir dari mediaindonesia.com dalam artikel berjudul “Kekerasan Terhadap Jurnalis di Seluruh Dunia Meningkat”, laporan UNESCO telah melakukan penyelidikan atas protes di 65 negara atas nasib jurnalis. Setidaknya ada 10 jurnalis tewas dalam rentang 2015 sampai 2020, serta terdapat 125 kasus penyerangan dan penangkapan jurnalis. Dalam laporan juga ditambahkan selama melakukan peliputan, jurnalis tak jarang menerima tindakan berupa dipukul, dilecehkan, ditangkap dan diculik serta intimidasi. Para wartawan yang meninggal dalam pekerjaan itu bekerja di Suriah, Meksiko, Israel, Nikaragua, Irlandia Utara, Nigeria, dan Irak. Data terbitan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 2021, di empat tahun terakhir laporan atas kekerasan meningkat dan pelaku kekerasan paling dominan adalah dari aparat kepolisian. Aparat kepolisian kerap kali terlibat dalam beberapa peristiwa kekerasan pada pers.

Indeks Kebebasan Pers atau Press Freedom Index yang dirilis oleh *Reporters Without Borders*, rata - rata dari 150 negara yang tersurvei masih didominasi kebebasan menengah kebawah. Negara yang ada dalam kelas kebebasan pers yang baik hanya Norwegia, Finlandia, Swedia, Belanda dan Denmark di tahun 2021. Jurnalis punya tugas dan peran yang mengharuskan mereka untuk terlibat dalam isu - isu tertentu dengan misi dokumentasi. Peran wartawan yang ditempatkan pada posisi netral ini kerap kurang dipahami sehingga menjadi salah satu penyebab masih terjadinya kekerasan pada jurnalis. Faktor lain juga bisa muncul dari jurnalis itu sendiri yang kurang bisa secara profesional saat bertugas dan bersikap. Faktor lain

ketika jurnalis harus terintegrasi dengan pemerintahan yang mana geraknya bisa saja dibatasi, ditekan, bahkan diberhentikan oleh entitas yang lebih punya legitimasi dalam lingkup tersebut. (“Ten Years for Justice in Maguindanao Case Is Too Long,” 2019)

Kejadian pembantaian Maguindanao yang memakan korban jurnalis tewas di dalamnya yakni 32 orang, menjadi peristiwa terburuk nan berdarah bagi sejarah jurnalisisme dunia. Berkatnya, Filipina masuk pada kategori 10 negara paling berbahaya untuk pekerja media, jurnalis dan berita. Terdapat banyak kegagalan pemerintah Filipina sebagai yang bertanggungjawab atas keamanan serta kebebasan para pekerja media. Faktanya dari sejak pembantaian tersebut hingga sekarang masih secara berkala terjadi tindakan - tindakan yang menekan pekerja media, mulai dari penganiayaan hingga pembunuhan lagi. Pada akhir 2021 kemarin ada kasus penembakan wartawan Filipina, Jesus Malabanan yang menerima luka tembak di bagian kepala. Bahkan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte membekukan beberapa media setempat dalam meliput aktivitas pemerintahannya. Media *Rappler* dinilai terlalu kritis dalam mengkritik pemerintah dan dituntut dengan pasal pencemaran nama baik. Surat kabar *Philippine Daily Inquirer* juga menerima ancaman dari pemerintah bahkan di Hari Kebebasan Pers.

Contoh tersebut mengindikasikan adanya bentuk semacam intimidasi dan pembatasan jurnalisisme, yang pada Indeks Kebebasan Pers Dunia 2018 Filipina mengalami penurunan kembali. Filipina sekarang berada dalam kondisi yang sangat berbahaya di mana hak asasi manusia dilanggar, Duterte merusak kontrol dan keseimbangan demokrasi tradisional terhadap otoritasnya. Perang melawan narkoba

membawa situasi yang mengancam, dimana banyak dilakukan intimidasi dan aksi main hakim yang tak jarang mengorbankan nyawa jurnalis. Pola yang sama mengingat juga melibatkan motif politik. Filipina yang menunjukkan budaya impunitas akan memungkinkan Presiden Duterte untuk menghindari hukuman dari konsekuensi yang disebabkan oleh perang melawan narkoba. (BUI & BACHA, 2018)

Ini mengindikasikan dan mengkonfirmasi Filipina sebagai negara yang tidak sehat untuk jurnalisme dan pers. Masih terjadinya tindak kekerasan yang jauh dari situasi damai hingga menghilangkan nyawa manusia khususnya jurnalis, menjadikan topik ini layak untuk didiskusikan kembali. Dalam tulisan ini, nasib jurnalis akan dilihat menggunakan konsep pendekatan kekerasan Johan Galtung. Mulai dari bagaimana kekerasan langsung, struktural dan kultural serta bagaimana ketiganya bisa dikaitkan. Tulisan ini akan fokus mengupas kekerasan yang terjadi pada jurnalis khususnya di Filipina pasca terjadi Pembantaian Maguindanao.

Teori kekerasan struktural tepat untuk menjelaskan kompleksitas kekerasan setelah pembantaian tersebut dengan persidangan yang sulit. Berkaca pada fenomena yang ada di jurnalisme dunia, tulisan ini akan menggunakan konsep kekerasan Johan Galtung untuk menganalisis kekerasan yang ditimpakan pada mereka pekerja media. Dengan memahami faktor dan mengidentifikasi kasus - kasus kekerasan tersebut serta merangkainya menjadi alur kekerasan yang akhirnya sampai ke jurnalis, diharapkan akan bisa menjawab persoalan serupa yang bisa dan mungkin terjadi di masa mendatang. Sehingga pemetaan kekerasan ini akan menambah pertimbangan dalam mengambil tindakan penyelesaian ketika menghadapi kasus serupa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini penulis mencoba untuk menganalisis serta memetakan bagaimana kekerasan struktural jurnalisme diterapkan di Filipina pasca pembantaian Maguindanao 2009-2020 dari konsep kekerasan struktural Johan Galtung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.1.1 Untuk memetakan kekerasan struktural yang dialami oleh jurnalis Filipina pasca Pembantaian Maguindanao 2009-2020

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini mencakup dalam ilmu hubungan internasional dengan tema pembahasan Studi Konflik dan Perdamaian. Dari beberapa pembahasan mengenai kekerasan pada jurnalis Filipina pasca pembantaian Maguindanao 2009 belum ada yang spesifik menggunakan konsep kekerasan Johan Galtung. Berpatokan pada salah satu peristiwa terburuk bagi jurnalis baik di Filipina juga pada dunia, sehingga periode ruang penelitian ini ada ditahun setelah insiden tersebut tahun 2009 hingga tahun 2020. Dalam kurun periode tersebut adalah masa peradilan kasus Maguindanao yang akhirnya persidangan menghasilkan putusan bagi pelaku setelah lebih dari 10 tahun berlalu. Maka tahun 2020 adalah tahun yang sesuai, juga akan disinggung pula terkait nasib jurnalis Filipina di beberapa tahun terakhir yang berdasarkan data sejak Presiden Filipina Rodrigo Duterte menjabat dari 2016, sebanyak 22 jurnalis Filipina

terbunuh sedangkan peradilan kasus Maguindanao belum sepenuhnya tuntas. Sehingga penelitian ini berupaya menawarkan analisa kekerasan dan memetakannya yang terjadi sebagai tinjauan serta pertimbangan untuk memperoleh penyelesaian dari segala tindak kekerasan pada jurnalis Filipina.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pertama, adalah jurnal artikel karya Johan Galtung berjudul “Cultural Violence”. Dalam jurnal penelitian ini Galtung memperkenalkan konsep dari Cultural Violence yang juga berkaitan dengan kekerasan budaya dan struktural. Perwujudan serta simbol dalam menciptakan legitimasi untuk melakukan tindak kekerasan. Serta akan disebutkan ada 6 budaya dominan yang masing – masingnya dalam studi kasus diidentifikasi sebagai alasan rasional untuk menjangkau tindak kekerasan langsung maupun struktural. Topologi kekerasan yang juga akan membantu dalam memetakan masalah struktural. Teori inilah yang akan digunakan untuk memetakan bentuk kekerasan jurnalis Filipina. (Galtung, Cultural Violence, 1990)

Kedua, artikel dengan judul “Kebebasan pers dan kesenjangan gender di Filipina pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte” yang ditulis oleh Muhammad Hamdan Yuwafik. Dalam artikel tersebut membahas tentang kebebasan pers yang kemudian direfleksikan pada perspektif gender. Data dari artikel tersebut mengambil survei lembaga Reporters Without Borders, Filipina berada di peringkat 134 dari 180. Kebebasan pers masih bermasalah di Filipina di bawah kepemimpinan Duterte yang dilatarbelakangi salah satunya kebijakan presiden. Atas alasan tersebut

isu yang berkaitan dengan nasib jurnalis di Filipina dapat menjadi sorotan bagaimana kebebasan pers di negara tersebut masih bermasalah. (Nurhalizah & Yuwafik, 2020)

Ketiga, artikel dengan judul “Kekerasan terhadap Jurnalis dalam menjalankan profesinya” yang diterbitkan oleh Universitas Islam Bandung Repository. Penelitian tersebut mengungkap hal di balik pengalaman kekerasan yang dialami oleh jurnalis dan wartawan dalam melakoni tugasnya. Penelitian tersebut mempertanyakan kebebasan pers mengingat semakin meningkatnya kasus kekerasan yang ditujukan ke pelaku profesi jurnalis. Artikel tersebut merupakan satu dari sekian referensi terkait hak dan kebebasan pekerja pers dimana sering kali mereka memperoleh tindak kekerasan yang tak lain berkat motif politik sehingga dijalankan secara terstruktur. Penelitian juga menitikberatkan bahwa kekerasan terhadap wartawan tidak akan terjadi, jika masyarakat memiliki budaya menghargai fungsi dari tugas jurnalis. (Yuni & Zakiah, 2019)

Keempat, artikel dengan judul “The Philippines under Duterte: How Journalism, the Judicial System, and Politics have Changed” 2019 dan ditulis oleh Marites Vitug. Sebagai salah satu jurnalis terbaik Filipina ia memberikan pandangan analitis melihat bagaimana kebebasan pers pada era pemerintahan Duterte. Dalam interview tersebut bertopik utama pada bagaimana perang melawan narkoba, menghadapi konflik moro dan prospek politik untuk Filipina. Mengingat nama presiden Duterte akan bersinggungan dan berpengaruh maka artikel diatas menjadi pertimbangan serta urgensinya tentang kebebasan pers juga disebut dalam artikel tersebut. (Vitug, 2019)

Kelima, dari artikel berjudul “The Maguindanao Massacre - A Serious Challenge to Human Security in the Philippines” oleh France Jeanne L Sarmiento. Penelitian tersebut membahas pada pembantaian Maguindanao 2009 serta motif dibalik pembunuhan 57 orang tersebut. Ia menilai dampak dari peristiwa tersebut akan mengancam keamanan manusia yang menggunakan terminologi UNDP tentang keamanan manusia. Artikel ini sebagai acuan mengapa dan bagaimana pembantaian Maguindanao 2009 menjadi sangat berdampak pada keamanan manusia di Filipina yang termasuk keamanan pekerja pers. Mengingat tercatat sebagai tragedi jurnalis terburuk baik di Filipina bahkan dalam sejarah. Sehingga dari catatan tersebut penulis berupaya untuk menerapkan model perspektif kekerasan struktural pasca kejadian tersebut.(Sarmiento, 2013)

Keenam, dari artikel dengan judul “Freedom of the Press 2017 - Philippines” yang terbit 2017 membahas sejarah pers di Filipina hingga di era Duterte. Kebijakan Duterte terkait jurnalistik disana tidak begitu memuaskan pasalnya rezim kebebasan informasi tersebut cakupannya relatif sempit dengan beberapa jumlah pengecualian. Niat untuk mengadvokasi keselamatan jurnalis tidak dilakukan dengan investigasi besar. Dua orang di hukum karena membunuh jurnalis pada tahun 2016, namun masih saja Filipina menjadi salah satu dari negara yang tidak aman bagi profesi dan praktik jurnalisisme.(House, 2017)

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan masuk dalam cakupan studi hubungan internasional yakni dengan menggunakan Teori Kekerasan Struktural oleh Johan Galtung. Sebagai pertimbangan mengapa konsep kekerasan akan berlaku pada studi kasus pembantaian jurnalis Filipina karena melihat dari sejarah, jumlah dan motif pada setiap kasusnya dimana akan nampak satu atau permasalahan struktural yang mengakar. Permasalahan ini tentu akhirnya berbuah pada kekerasan - kekerasan fisik yang nampak dipermukaan. Sedangkan cikal bakal kekerasan tersebut jauh ada di dalam sistem yang struktural hingga menjadikan jurnalis sebagai aktor yang dirugikan sistem ini, sehingga konsep kekerasan struktural Johan Galtung dirasa tepat untuk dapat menjelaskan kondisi tersebut.

Konsep kekerasan Johan Galtung mengkategorikan bentuk kekerasan ke dalam 3 pemahaman kekerasan, yakni kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Kekerasan sendiri dimaknai Galtung sebagai sebuah penghalang yang bisa menciptakan kondisi dimana seseorang tidak bisa mengekspresikan diri secara wajar. Dalam hal ini kekerasan merupakan bersifat opsional artinya sangat bisa dihindarkan untuk terjadi, yang mana akan sangat bergantung pada bagaimana cara konflik itu dikelola. Sehingga terdapat keterkaitan antara konflik dengan kekerasan, dimana konflik bisa saja bersifat konstruktif dan membangun sedangkan kekerasan sudah pasti destruktif dan merusak.

Bagaimana kita memahami kekerasan dengan Johan Galtung menjelaskan kekerasan dalam tiga dimensinya; kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan

kekerasan kultural. Dia menyarankan bahwa dimensi kekerasan ini dapat digambarkan sebagai tiga lengan segitiga. Kekerasan adalah setiap perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan orang lain dan diri kita sendiri. Kekerasan adalah salah satu kemungkinan respon terhadap situasi konflik tertentu. Ini tidak berarti bahwa kekerasan tidak dapat dihindari. Kekerasan tidak bisa dihindari dan tidak boleh disamakan dengan konflik. (Galtung, 1990)

Dengan kata lain, kekerasan terdiri dari tindakan, kata-kata, sikap, struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan fisik, psikologis, sosial atau lingkungan dan/atau menghalangi orang untuk mewujudkan potensi kemanusiaan mereka sepenuhnya. Kekerasan dapat sangat terstruktur dalam sistem interpersonal, lingkungan sosial ekonomi dan politik, dan bahkan dalam budaya sosial dan sistem global. Oleh karena itu, kekerasan struktural pada gilirannya dapat menjadi penyebab konflik sekaligus respon perilaku terhadap situasi konflik tertentu. (Akoijam, 2012)

Kekerasan struktural atau *Structural Violence* merupakan kekerasan yang tidak mempunyai bukti atau pelaku untuk bertanggung jawab terhadap kekerasan yang sudah terjadi, yang mana ini melukai kebutuhan dasar manusia. Dalam kajian Galtung ada empat sebutan kebutuhan dasar yaitu; kebutuhan atas hidup, kebutuhan atas kemerdekaan, kebutuhan atas kesejahteraan, dan kebutuhan atas identitas. Kekerasan struktural mengakibatkan kerugian bagi kelompok yang lebih lemah atas kelompok yang mempunyai hak lebih besar. (Galtung 1990)

Gambar 1. Topologi Kekerasan Johan Galtung

	Survival Needs	Well-being Needs	Identity Needs	Freedom Needs
Direct Violence	Killing	Maiming Siege, Sanctions Misery	Desocialization Resocialization Secondary Citizen	Repression Detention Expulsion
Structural Violence	Exploitation A	Exploitation B	Penetration Segmentation	Marginalization Fragmentation

Sumber : Cultural(Galtung, 1990)

Kekerasan langsung dalam terminologi Galtung merujuk pada kekerasan yang tindakan atau dampaknya dapat dilihat langsung secara fisik. Tindakan seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan atau penganiayaan merupakan contoh tindakan kekerasan langsung yang melibatkan kekuatan fisik. Terdapat juga kekerasan langsung non-fisik atau kekerasan verbal yakni penghinaan, ancaman, cemooh, provokasi dll. Sifat kekerasan yang *intangibile* atau tidak nampak inilah yang membuat lebih sulitnya menangani kekerasan struktural yang terjadi pada area tertentu. Sama halnya dalam kasus jurnalis di Filipina yang baik secara langsung atau tidak menerima tindak kekerasan. Kekerasan Struktural berdampak pada kematian dan penderitaan seperti halnya dampak pada *direct violence*, namun kerusakan yang diberikan kepada korban-korban dialami secara perlahan-lahan, halus, bersifat umum, dan lebih sulit untuk diperbaiki. (Galtung, Cultural Violence, 1990)

Karena terjadi secara sistem dan mengakar terpendam dalam tradisi, hingga sering kali kekerasan jenis ini terjadi dan dilakukan di ranah alam bawa sadar sehingga tidak disadari oleh para aktor yang berperan dan melakukan kekerasan tersebut. Sehingga dapat dikatakan proses terjadinya akan berkaitan dengan sejarah, kebiasaan serta nilai atau norma pada kawasan tersebut. Karena alurnya yang sering

kali abu abu sehingga penafsiran baik siapa pelaku maupun korban akan lebih sukar, maka untuk mengenali tindak kekerasan ini memerlukan analisa.

1.7 Argumen Sementara

Kesimpulan sementara dari penelitian ini mengacu pada rumusan masalah serta judul penelitian. Berdasarkan latar belakang konflik serta merefleksikan pada kondisi dalam hal ini kekerasan struktural pada jurnalis di Filipina, penulis berhipotesis bahwa kekerasan struktural terjadi dari dalam pemerintahan yang akhirnya berbuah pada kekerasan fisik yang nampak. Melihat lambatnya proses hukum atas pembantaian Maguindanao 2009 ditambah dengan penempatan Filipina sebagai salah satu negara paling berbahaya bagi jurnalis dapat menguatkan bahwa memang terjadi serangkaian kekerasan pada jurnalis disana. Ini dipengaruhi adanya faktor kultural yang kuat dari sejarah yang lekat akan kekerasan politik yang melanggengkan kekerasan struktural.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan rangkaian kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Dalam hal ini meninjau latarbelakang kekerasan, sejarah serta keterkaitan antar tindakan baik struktural yang dipengaruhi oleh budaya kekerasan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji negara dan pemerintahan dalam hal ini Negara Filipina dimana pada studi hubungan internasional subjek ini berada pada level Meso. Sedangkan objek pada penelitian ini yakni sikap negara dan pemerintah kepada pekerja pers atau jurnalistik disana, bagaimana impunitas bekerja, iklim politik serta budaya kekerasan.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dari website atau portal berita internasional maupun lokal Filipina tentang terjadinya kasus pelanggaran atau kekerasan pada pekerja pers di Filipina. Data juga didapat dari beberapa video wawancara dengan jurnalis Filipina tentang bagaimana nasib pekerja bidang tersebut disana. Selain itu terdapat situs lokal yang kerap memberitakan dan mengkritisi pemerintah yakni “rappler” yang kerap mengangkat isu jurnalis. Data juga diperkuat dengan mengutip dari beberapa penelitian terkait jurnalisme dan budaya kekerasan di Filipina serta sumber jurnal yang kredibel.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab pertama dalam penelitian ini adalah latar belakang masalah, yang menjelaskan gambaran umum dan alasan pemilihan topik. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, argumen sementara, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Tujuan dari penulisan bab pertama adalah agar penulis dapat memetakan permasalahan yang diteliti.

Bab kedua berisi ulasan singkat perkembangan bentuk kekerasan pada jurnalis yang terjadi di Filipina dari sejak 2009 sampai 2020. Dengan menyajikan data statistik yang relevan, serta spesifik akan menjelaskan kasus - kasus kekerasan pada jurnalis dan apa yang terjadi selama periode tersebut serta bagaimana respon atas kasus - kasus tersebut. Bab ini juga akan berisikan kebijakan atau langkah apa yang dilakukan khususnya pemerintah setempat atas segala kasus yang telah terjadi. Ini akan berkaitan dengan bagaimana sebuah pekerjaan jurnalis menjadi sedemikian berbahaya di Filipina dengan faktor - faktor yang melatarbelakanginya.

Bab ketiga berisi analisis atas kasus - kasus kekerasan yang terjadi serta mengklasifikasikannya seperti apakah kekerasan struktural yang terjadi dengan menggunakan konsep dalam ilmu Hubungan Internasional. Pendefinisian kekerasan struktural, kekerasan budaya dan kekerasan langsung yang disesuaikan dengan studi kasus. Bagaimana memahami kekerasan dalam politik serta apa dampaknya pada jurnalisme di Filipina. Serta menjelaskan kekerasan langsung yang mana

Pembantaian Maguindanao 2009 merupakan salah satunya diantara rentetan kejadian kekerasan yang banyak terjadi tanpa hasil peradilan yang ideal.

Bab keempat berisi penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan adalah penegasan kembali dari bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya, dan rekomendasi bertujuan untuk memberikan evaluasi hasil penelitian terkait topik pembahasan studi kasus.

BAB II

MEDIA DAN POLITIK DI FILIPINA

Memahami relasi antara media dengan perpolitikan Filipina, ini diperlukan untuk sekaligus memperoleh keterkaitan peran jurnalis media dengan pemerintah dan elit. Penulis berupaya untuk mengerucutkan perspektif untuk bisa memposisikannya sebelum melakukan analisa di bab berikutnya.

Pada bab ini akan terdiri atas 3 sub-bab dimana bagian pertama akan menguraikan posisi media dalam politik dan keterlibatan serta kewajibannya. Juga menyajikan data hukum tentang jurnalisisme yang termasuk di dalamnya hak media dalam politik. Kemudian ditutup dengan kritikan terhadap jurnalisisme Filipina oleh Louie Montemar, seorang praktisi politik Filipina.

Selanjutnya, sub-bab kedua memfokuskan pada rentetan kejadian dan kasus kekerasan yang terjadi selama jangka waktu 2009 – 2020, dimana proses peradilan kasus Maguindanao masih digantung atau diproses. Data ini menampilkan banyak tabel angka dari tahun ke tahun. Ini sebagai representasi kekerasan yang muncul di permukaan sebagai wajah dari kekerasan struktural. Ini dimaksudkan untuk membingkai situasi dari konflik selama periode tersebut.

Kemudian bagian ketiga akan menyebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi pekerjaan jurnalis menjadi sedemikian terancam dari kekerasan. Faktor – faktor ini akan dianalisa di bab berikutnya juga sebagai dasar yang kokoh untuk memetakan kekerasan struktural jurnalis Filipina.

2.1 Posisi Media dalam Sistem Sosial Politik di Filipina

Konstitusi Filipina telah menjamin kebebasan berbicara dan akses informasi di negara tersebut. Hukum dalam undang - undang Pasal III Ayat 4 menyatakan bahwa 'Tidak ada undang-undang yang akan disahkan yang membatasi kebebasan berbicara, berekspresi, atau pers, atau hak rakyat untuk berkumpul secara damai dan mengajukan petisi kepada pemerintah untuk memperbaiki keluhan.' Rakyat dan pers juga memperoleh hak untuk akses pada catatan resmi dan dokumen berkaitan dengan data penelitian pemerintah yang digunakan untuk pengembangan kebijakan.

Dalam periode ini juga mendapat hak Tahun 2016 Presiden Filipina menandatangani FOI (Freedom of Information) yang memberikan petunjuk kebijakan untuk penyiaran terkait informasi dari pejabat dan politisi. Ini juga didukung dalam Philippines Mass Media Laws, wawasan penulis tentang pernyataan pejabat pemerintah tentang bagaimana seharusnya praktisi media menjalankan profesinya. Presiden Gloria Macapagal-Arroyo, misalnya, mengatakan dalam pidatonya di depan Kapisanan Brodkaster Pilipinas (KBP) bahwa media harus membuang “citra bad boy” mereka dan harus fokus hanya pada pemenang, khususnya perbaikan ekonomi negara. Tatanan sosial-politik Filipina telah banyak digambarkan sebagai feodal atau oligarki, sebagai aturan bos, bosisme, caciquisme, demokrasi cacique , demokrasi mafia, kekeluargaan, atau anarki keluarga. Terlepas dari variasi dalam penekanan, semua penokohan berbagi satu poin yakni sistem pengaturan disiplin yang berbasis paksaan dan berhasil menjunjung tinggi aturan segelintir orang. (Kreuzer, 2009)

Pers dalam kapasitasnya punya ruang untuk mengadvokasi isu-isu tertentu serta menjadikannya argumentasi publik yang umumnya ditujukan pada penguasa. Istilah “Fourth Estate” yang bisa diterjemahkan sebagai peran pers dalam struktur kenegaraan atas kelangsungan demokrasi di suatu negara. (Montemar, 2022) Filipina mengadopsi sistem Presidensial dimana kepala negara juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, serta pemerintahannya terdiri atas tiga cabang interdependen yakni legislatif, eksekutif dan yudisial. Dengan ideologi demokrasi, negara Filipina relevan pada istilah “Fourth Estate” sekaligus mengkonfirmasi bahwa negara ini memberi ruang bagi pers dalam pemerintahan.

Menurut pengamat sekaligus professor di Polytechnic University of the Philippines, Manila (PUP), Louie Montemar, ia mengungkapkan bagaimana seharusnya pers difungsikan dan dijalankan di Filipina. Dalam tulisannya dengan judul “The TV5-ABS-CBN deal and what media should be all about”, ia menyebutkan setidaknya ada 5 dampak media massa bagi masyarakat.

Pertama media untuk menyatukan orang, dalam hal ini berperan menghubungkan antara orang dengan komunitas atau sebaliknya. Kedua, media dapat berperan sebagai kesempatan dan sarana pendidikan. Dimana pendidikan di banyak negara, pemisahan antara bahasa lokal dan nasional serta masalah literasi dapat mempersulit komunikasi. Media massa dapat mengisi kesenjangan ini. Media memberikan siaran berisikan konten gratis dengan bahasa dan kurikulum yang selaras.

Ketiga, media berfungsi sebagai pengawas kepentingan publik. Organisasi berita memainkan peran penting untuk memberitahu publik tentang apa yang sebenarnya terjadi di lembaga pemerintah dan bisnis. Keempat, media menyediakan informasi tentang masalah mendesak, abadi, dan mendasar seperti perawatan kesehatan dan bantuan dan rehabilitasi bencana. Terakhir, media menghidupkan isu-isu sosial. Ini adalah hal-hal yang jika tidak akan tetap sebagai angka dan konsep tanpa relevansi dengan publik. Mengadvokasikan gagasan dan kepentingan untuk perubahan sosial publik.

Montemar juga menegaskan bahwasanya publik adalah berhak atas informasi yang valid dari jurnalis terlatih. Pemerintah dan negara seharusnya bisa menjadikan media sebagai mitra dalam kerja dan pembangunan, termasuk di dalamnya untuk menyajikan pementasan yang membawa nilai-nilai. Nilai yang dimaksud adalah demokrasi, penerapan demokrasi ini juga semestinya disokong dengan publik yang terinformasi dengan baik.

Meski begitu, negara ini belum memiliki undang-undang yang kuat untuk kebebasan informasi, serta adanya regulasi nasional yang membuat informasi dari dalam pemerintah sangat sulit untuk diakses. (Montemar, 2022) Jurnalis Filipina juga memahami porsinya dalam hal orientasi profesional. Edson C. Tandoc Jr dari Universitas Teknologi Nanyang Singapura, menulis penelitiannya dalam “World of Journalism Study” yang melakukan kajian terhadap wartawan di Filipina pada Juli 2016. Penelitian dengan metode survei pada wartawan setempat. Ini menjawab dari

sudut pandang wartawan di sana tentang posisi pers dalam dunia jurnalis dalam setiap peristiwa politik Filipina. (Tandoc Jr, 2016)

Sebagian besar wartawan sadar akan peran untuk melakukan pelaporan peristiwa sebagaimana adanya, berkontribusi untuk mendidik khalayak serta mengadvokasi perubahan sosial. Wartawan juga sebagian besar sepakat penting untuk mempromosikan toleransi dan keragaman budaya, membiarkan orang mengekspresikan pandangan mereka memantau dan mencermati para pemimpin politik, memberikan informasi yang dibutuhkan orang untuk membuat keputusan politik, dan memberikan analisis tentang peristiwa terkini.

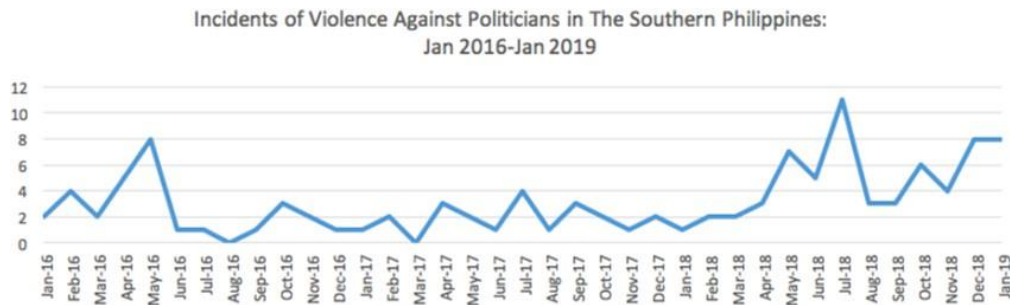
Dalam praktik jurnalisme di Filipina tak jarang menjadi sorotan. Ini berkaitan juga sejarah negara tersebut dimana sejak tahun 1986 sekitar 176 wartawan yang dibunuh dengan motif yang berkaitan dengan pekerjaan mereka sebagai jurnalis. Selama lebih dari dua dekade terakhir status berbahaya masih disematkan pada kondisi media dalam sosial politik di Filipina. Sebagai contoh, salah satu peran media khususnya pewartaan yang pernah bersitegang dengan Presiden Rodrigo Duterte, adalah ABS-CBN. Media lokal tersebut akhirnya diberhentikan siaran televisinya di tahun 2020 dengan alasan lisensi penayangan. Media ini di masa lalu membuat Presiden Rodrigo Duterte geram, yang oleh para wartawan disebut terkenal membungkam kritik media. Presiden Duterte telah lama berseteru dengan ABS-CBN, setelah media tersebut membuatnya marah pada pemilu 2016 karena menolak menayangkan iklan kampanyenya.

Ini bukanlah hal baru bagi seorang pemimpin negara di Filipina jika ditinjau dari sejarah presiden negara tersebut. Filipina di bawah rezim Marcos, kontrol berlebihan presiden atas media dan demokrasi fungsional, yang benar-benar dapat mendorong pembangunan sosial dan ekonomi meninggalkan warisan yang masih merusak demokrasi negara hingga periode terakhir ini. Dengan sedikit tenaga dan ruang untuk pengembangan, pers Filipina terus dengan mudah ditindas oleh pemerintah. Misalnya, Presiden Macapagal Arroyo sembarangan menutup semua media oposisi dalam keadaan darurat pada 23 Februari 2006. Era Duterte Dengan demikian, penindasan terhadap kebebasan pers adalah harga mahal yang harus dibayar rakyat Filipina dalam bingkai budaya impunitas yang lekat dalam sejarah.

2.2 Pembunuhan dan Serangan yang Bersifat Politis

National Union of Journalists of The Philippines (NUJP) sebagai organisasi non-pemerintahan melakukan berbagai kajian juga mengangkat isu mengenai pers di negara tersebut. NUJP merilis segenap dokumen tentang kode etik serta pedoman keselamatan komunitas jurnalis, khususnya bagi jurnalis Filipina. Roundtable dan Philippine Press Institute secara berkala mengadakan diskursus forum. *Election Violence : Lesson from Maguindanao Massacre*, forum tersebut berupaya untuk bercermin pada kejadian Maguindanao 2009. Cerminan atas betapa sarat akan kekerasan pada politik di Filipina selama aktor politik memiliki kuasa atas satuan militer swasta, ada bahaya kekerasan politik dalam pemilu. Kandidat dan pendukung bukan hanya risiko tetapi jurnalis yang meliput persaingan politik yang intens di tingkat lokal. (Philippine Press Institute, 2022)

Gambar 2. Statistik Insiden Politisi Tahunan di Wilayah Filipina Selatan 2016-2019



Sumber. <https://www.newmandala.org>, 2021

April dan Mei 2017 melihat kekerasan yang jauh lebih sedikit. Penurunan ini bertepatan dengan upaya pemerintahan Duterte dan sekutunya di Kongres untuk menunda pemilihan lokal hingga Mei 2018, diduga karena masalah yang melibatkan penunjukan eksekutif dan klaim pengaruh “uang narkoba” pada politik lokal. Namun melonjak kembali ketika mendekati periode pemilu 2018. Beberapa provinsi mengalami lebih banyak kekerasan terhadap politisi, distribusi insiden secara geografis tidak mengikuti pola yang jelas yang menunjukkan adanya pengaruh besar yang berperan. Empat provinsi yang mengalami jumlah serangan terbesar terhadap politisi adalah Maguindanao (24), Cotabato (17), Zamboanga del Sur (11), dan Basilan (9), dengan sisanya mengalami 5 insiden atau kurang. Konsentrasi kelompok bersenjata swasta di Maguindanao mungkin menjelaskan tingginya frekuensi insiden di sana, namun provinsi lain di Filipina Selatan juga terkenal karena kehadiran tentara swasta dan pemberontak yang bermotivasi ideologis, tetapi tidak mengalami tingkat kekerasan yang sama terhadap politisi. (Combinido & Brophy, 2019)

Tensi politik di Filipina adalah berdaya saing tinggi. "If You Can't Beat Them, Kill Them": Fatal Violence Against Politicians in the Philippines adalah salah satu jurnal yang mengkaji tentang fenomena ini. Peter Kreuzer dalam penelitian tersebut mengungkap meskipun Filipina menjadi negara demokrasi tertua di Asia Tenggara, politik dan kekerasan telah terjalin di sana selama beberapa dekade. Kekerasan mematikan selalu menjadi pendamping setiap orang yang aktif di bidang politik sejak tahun-tahun awal kemerdekaan hingga saat ini. Media liberal dan LSM di Filipina dan Global Utara secara teratur mengkritik kekerasan yang berasal dari kelas politik dominan dan penargetan jurnalis kritis, aktivis, pengacara dan jaksa penuntut umum atau hakim yang mengambil tindakan terhadap pemegang kekuasaan lokal. (Philippine Press Institute, 2022)

Kekerasan dalam hal ini dimanfaatkan sebagai sarana yang rasional untuk mencapai tujuan memperoleh, menegakkan, atau memperluas kekuasaan. Di satu sisi, keluarga mapan di tingkat provinsi dapat memilih untuk membunuh calon pejabat di tingkat yang lebih rendah, sementara di sisi lain, calon politisi tingkat rendah dapat memilih untuk membunuh lawan yang lebih tinggi jika mereka yakin tidak memiliki pilihan lain. Persaingan politik di Filipina terjadi secara eksklusif antara individu, keluarga, atau aliansi keluarga. Fakta sosial ini dibenarkan secara kognitif dan normatif. Meskipun ada beberapa keraguan tentang tatanan keluarga informal yang merusak tatanan formal partai dan lembaga negara, keluarga berfungsi sebagai prinsip tatanan yang diterima secara luas dan sah yang mendasari pemahaman sehari-hari, liputan media, dan analisis ilmiah tentang politik dan ekonomi Filipina.

Philippines Press Freedom menyebut politik itu masih pada konsep yang kuno karena berbasis pada klan, keluarga dan bos. Di beberapa wilayah, pemilu masih diadakan dengan persaingan sengit antar kubu klan politik termasuk untuk melibatkan elemen bersenjata. Situasi yang tidak hanya melibatkan aparat keamanan, tetapi bagaimanapun juga ini menjadi sorotan bagi pekerja pers. Organisasi pers Filipina, seperti NUJP dan PPF merespon dengan melakukan pelatihan bagi jurnalis.

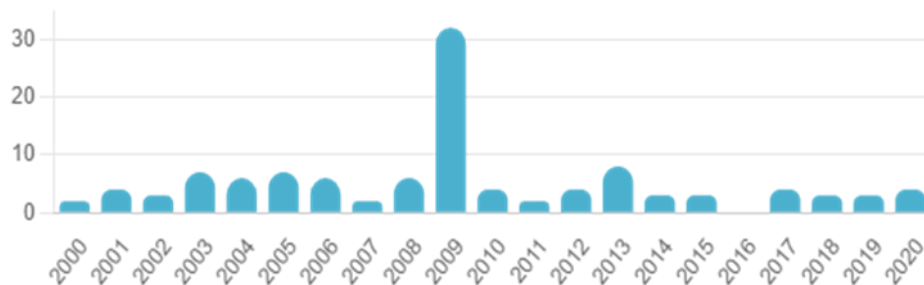
National Union of Journalists of The Philippines (NUJP) bersama Bulatlat, Pinoy Weekly dan Rappler menggelar dukungan atas kebebasan pers. Spanduk digital memuat frasa “Journalism is not Terrorism” sebagai bentuk kampanye solidaritas atas kasus-kasus baru yang melanggar kebebasan terutama pada pers. (NUJP, 2022) Selain itu, NUJP telah merancang program pelatihan untuk mempersiapkan wartawan tentang cara dan etis untuk meliput disituasi bahaya, termasuk dalam situasi politik yang rawan seperti pemilu. Katherine Cortez, seorang pelatih keselamatan dari NUJP membagikan program kesadaran keselamatan, juga menekankan pentingnya wawasan digital termasuk didalamnya serangan pada pers melalui peretasan, scam, hoax. (Philippine Press Institute, 2022)

Masih dalam forum Election Violence : Lesson from The Maguindanao Massacre, dengan situasi yang seperti ini wartawan harus melengkapi diri mereka dengan atribut pelindung diri serta identitas sebagai ID wartawan. Ini sebagai bentuk upaya antisipasi dari sesama rekan jurnalis agar dapat menjalankan liputan mereka dengan jauh lebih aman dan sesuai kode etik. Sikap yang perlu diambil dari sudut

pandang jurnalis memahami tensi politik dengan resiko dibui bahkan ancaman nyawa.

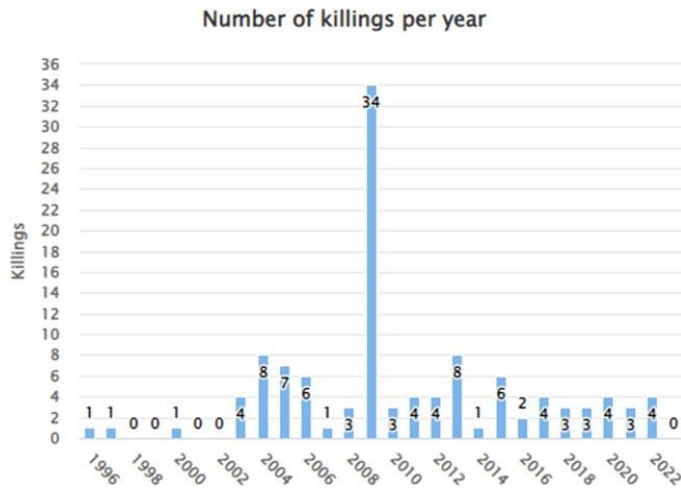
Laporan dari Reporter Without Border yang merilis daftar kematian atau pemenjaraan mereka yang terkait dengan aktivitas jurnalisme di Filipina. Saat ini ada 524 jurnalis yang sedang dalam masa tahanan ditambah 20 pekerja media yang kebanyakan bekerja untuk stasiun radio di provinsi, bukan di ibu kota. Hanya sedikit kasus yang berhasil ditangkap, apalagi berhasil diadili. Terhitung dari sejak 2009 hingga 2020, jumlah wartawan tewas dari tahun ke tahun masih secara rutin terulang. Lebih lanjutnya tercantum pada gambar 1 grafik berikut.

Gambar 3. Grafik jumlah jurnalis Filipina yang terbunuh dari tahun 2000 sampai dengan 2020 laporan dari RSF.



Sumber www.rsf.org, 2020

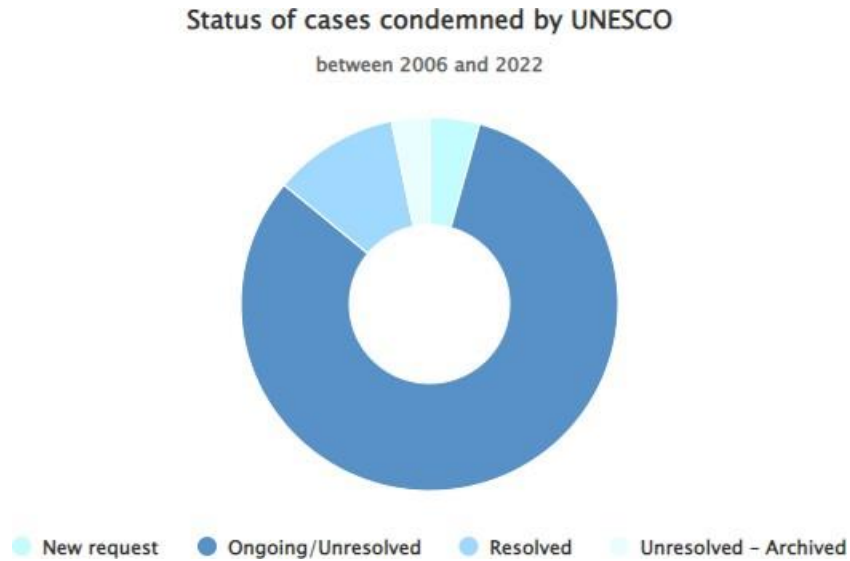
Gambar 4. Jumlah jurnalis Filipina yang terbunuh selama bertugas versi laporan dari UNESCO.



Sumber <https://www.unesco.org>, 2022

Dalam hampir sekitar 80 persen dari 263 kasus pembunuhan jurnalis, tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban sementara pemerintah menunjukkan sedikit minat untuk menemukan pelakunya. INQUIRER.NET dalam sorotannya menuliskan “PH still among most dangerous countries for journalists” juga mengapresiasi bahwa Filipina telah membaik menyusul vonis penting terhadap mereka yang terlibat dalam kasus pembantaian Maguindanao. (Subingsubing & Santos, 2022) Namun masih banyak kasus yang tidak memperoleh pertanggungjawaban secara adil. UNESCO mencatat dari 2006 hingga akhir tahun 2022 setidaknya terdapat 81.7% kasus berstatus *Ongoing/Unresolved*. Sedangkan kasus yang berstatus terselesaikan atau *Resolved* adalah 10.8%. Sebagai perbandingan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Gambar 5. Rasio status kasus pembunuhan jurnalis di Filipina dari tahun 2006 hingga 2022 dihimpun oleh UNESCO.



Sumber <https://www.unesco.org>, 2022

Sebelum terjadi pembantaian Maguindanao tahun 2009, Filipina di cap oleh CPJ (Committee to Protect Journalist) sebagai negara paling berbahaya nomor 2 di seluruh dunia. Maka darinya, dalam tabel sejak tahun 2000 masih konstan ada jurnalis yang terbunuh dengan motif pekerjaan. Tahun 2009 menjadi catatan buruk bagi dalam sejarah jurnalisme dunia. Manuver politik meningkat pada tahun 2009 tepatnya bulan November, Presiden Gloria Macapagal-Arroyo mengumumkan darurat militer di provinsi selatan Maguindanao, setelah 57 orang dibantai dalam upaya nyata oleh klan dominan di daerah tersebut untuk mencegah pendaftaran pemilihan calon pesaing. Reporters Without Borders pada 2018 menurunkan peringkat global kebebasan pers Filipina dari 127 menjadi 133 dari 180 negara. Selain

ancaman pemerintah dan pembatasan media, empat jurnalis dibunuh tahun lalu, menjadikan Filipina negara paling mematikan bagi jurnalis di Asia.

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Bagaimana Jurnalis Menjadi Profesi yang Rentan akan Kekerasan

Kepercayaan publik terhadap media kian lama terkikis oleh konsumsi berita dan informasi dari platform sosial media. Rekan jurnalis bertanggungjawab untuk dapat memupuk kembali kepercayaan publik terhadap media untuk sebagai referensi utama berita dan informasi bagi masyarakat. Di samping peranan kebijakan pemerintah serta narasi yang dibingkaikan pada media, signifikan sikap pemimpin negara dalam menghadapi peranan media secara politis juga berpengaruh pada kredibilitas media. Dalam diskusi oleh Philippines Press Institute dengan tema Future of Journalism “In The Age of Trolls and Influence”, disampaikan bahwa Presiden Rodrigo Duterte berperan penting dalam menurunnya kredibilitas media lama, menyebut jurnalis sebagai peretas bayaran, bias, dan "dilawan", merujuk pada oposisi politik. (Philippine Press Institute, 2022)

Dukungan massa terhadap Duterte tinggi dan apakah dukungan ini datang sebagai hasil dari intimidasi atau persetujuan yang sebenarnya bisa jadi sulit untuk dilihat. “Perang Melawan Narkoba” adalah kampanye teror negara terselubung, meskipun dalam praktiknya, kampanye tersebut telah mengakibatkan kematian ribuan orang Filipina, sebagian besar kaum miskin kota. (Human Rights Watch, 2019)

Wartawan secara teratur berada di garis bidik, bukti kredibel bahwa pemerintah

menggunakan Perang Melawan Narkoba untuk membunuh, menahan, atau mengancam oposisi termasuk untuk membungkam kritik yang sebagian banyak kritis muncul dari kawan media. (ALCED, 2019) Meskipun belum terbukti secara meyakinkan bahwa pemerintah menggunakan daftar pantauan untuk membenarkan pembunuhan politisi saingannya, namun beberapa temuan narasi - narasi politis yang bersifat konfrontatif juga mengintimidasi wartawan.

Stigma yang diwariskan menjadikan media Filipina sebagai “musuh” presiden tentu berlawanan dengan konstitusi yang menjamin kebebasan berbicara dan berekspresi. Pada 2016, Presiden Rodrigo Duterte berdeklarasi tak lama setelah ia menjabat menjadi presiden. Duterte menyatakan bahwa jurnalis yang “korup” tidak dibebaskan dari pembunuhan. Diungkap oleh Freedom Press dalam laporannya, narasi tersebut berkontribusi pada lingkungan yang akan tidak bersahabat bagi jurnalis. 2017 Di Filipina, cercaan dan ancaman pembunuhan jurnalis semakin mengobarkan lingkungan yang sudah berbahaya bagi pers dan merusak langkah-langkah positif pemerintah, seperti inisiatif tentang keselamatan jurnalis dan kebebasan informasi. Sejarah kekerasan ekstrem negara itu terhadap media dan impunitas atas kejahatan semacam itu membuat pernyataan Duterte semakin mengancam. (Conde, 2018)

Konsep “anti-media” di Filipina mungkin bukan komunitas, organisasi, atau bahkan diakui sebagai sektor masyarakat yang mapan. Konsep anti-media juga muncul sebagai akses yang relatif bebas bagi semua kalangan, termasuk publik yang akhirnya ikut berkampanye untuk melarang beberapa media seperti Rappler dan

ABS-CBN yang dinilai bias. (Beltran, 2017) Kampanye dengan tag #ABSCBNBoycott melalui laman Facebook bagian seruan agar berhenti menonton siaran stasiun yang dinilai bias. Terutama bagi kelompok pendukung Duterte, ini mungkin tampak seperti bentuk pemberontakan atau kumpulan pengganggu terhadap media arus utama, tetapi ini menunjukkan bagaimana negara menikmati konsep demokrasi dan kebebasan. Beberapa dampak yang semakin diperkuat oleh retorika dan sikap Presiden Duterte di media.

Pemerintahan Duterte meningkatkan serangannya terhadap kebebasan media pada Januari 2018 dengan mengancam penutupan Rappler.com, sebuah outlet berita online yang mengkritik “perang melawan narkoba.” (Freedom House, 2022) Rappler harus menerima ancaman pembunuhan kepada pihaknya, karena dinilai terlalu kritis pada pemerintahan Duterte. Ini berbuntut pada merevisi perijinan reporter Rappler untuk meliput di Istana Malacanang yakni rumah dinas presiden. Belum sampai disitu, tuntutan atas pencemaran nama baik oleh pemerintah kepada situs berita Rappler berakibat pada dilarangnya platform media ini. Sebagai salah satu media surat kabar yang paling berpengaruh di Filipina, media lain seperti Philippine Daily Inquirer juga menerima serangan serupa.

Sejak Presiden Arroyo datang dan menjalankan kekuasaan, ratusan kasus pembunuhan, penghilangan, ancaman pembunuhan dan penyiksaan telah terjadi didokumentasikan oleh organisasi hak asasi manusia independen. Apalagi represi terhadap pers, eksekusi sewenang-wenang, pembunuhan di luar hukum, budaya superioritas, dan keadilan yang tidak memadai sistem adalah hasil

langsung dari impunitas yang pada akhirnya melemahkan demokrasi di Filipina. (Rosenberg, 1974) Ini menjadi masalah yang sangat struktural yang berkaitan dengan kekerasan dan kekuasaan. Misalnya, pers sebagian besar terbatas pada khalayak yang relatif kecil sebagian besar terdiri dari warga perkotaan dan kelas atas. Dengan demikian, pasar tidak cukup untuk mempertahankan industri media yang independen. Juga, jurnalis seringkali kurang terlatih dan upah yang rendah yang berujung pada sabotase media yang dipertimbangkan sebagai oposisi.

Pemerintah juga melakukan upaya pelarangan wartawan yang dinilai telah “mencemari” nama baik anggota dewan dari meliputi badan legistatif nasional. Dewan Perwakilan Rakyat Filipina dalam rancangan peraturan baru membuat regulasi terbaru melawan kebebasan pers di Filipina, di mana serangan datang dari tingkat pemerintahan tertinggi. Dalam laporan dari Rappler, draf dokumen ini mengatakan aturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga martabat lembaga dan tidak mengorbankan atau menghambat pekerjaan legislatif pembuat undang-undang. (San, 2018)

Pasalnya, praktik manipulasi informasi masih marak dan langgeng dimanfaatkan baik pemerintah juga oleh aktor lainnya. Jelang pemilu disana akan bertebaran konten kampanye, dan tak jarang informasi yang telah dimodifikasi dengan kepentingan politik tertentu. Manipulasi konten online seputar pemilu dilakukan di seluruh spektrum politik. Perusahaan hubungan masyarakat semakin menawarkan layanan untuk mengedarkan informasi palsu atau menyesatkan. Perusahaan menawarkan layanan yang terdiri dari strategi tingkat tinggi yang

ditawarkan oleh eksekutif pemasaran, termasuk untuk bisa memperoleh liputan yang positif. Tingkat kepercayaan jurnalis pada institusi dan lembaga pemerintah berujung rendah adalah efek yang tak terelakan dari situasi ini.

Gambar 6. Tingkat Kepercayaan Jurnalis Filipina pada Institusi dan Lembaga Sumber

Table 7: Journalistic trust in institutions

	N	Percentage saying "complete" and "a great deal of trust"	Mean	Standard Deviation
The news media	326	46.3	3.40	.69
Religious leaders	325	21.5	2.88	.91
The judiciary/the courts	325	17.8	2.94	.71
Trade unions	325	11.1	2.70	.75
The military	326	9.5	2.67	.75
The government	325	8.9	2.64	.76
The police	326	6.4	2.55	.72
The parliament [Congress]	326	2.1	2.40	.72
Politicians in general	325	.9	2.10	.73
Political parties	325	.3	2.10	.70

Sumber : world of journalism

Jurnalis bersikap kurang percaya pada hampir seluruh institusi resmi negara. Seperti elemen penting dalam pemerintahan baik itu partai politik, politisi serta kongres. Sentimen skeptis dari pihak jurnalis semakin menghimpit posisi mereka, bahkan dalam hal pasukan keamanan tidak begitu mempercayai polisi dan militer. Satu-satunya institusi yang mereka percayai adalah diri mereka sendiri, media berita. Pemuka agama juga dipercaya lebih dari lembaga lainnya. Filipina mayoritas beragama Katolik. Dalam hal negara, peradilan adalah cabang yang paling dipercaya.

Faktor upah jurnalis relatif rendah mempertimbangkan gaji jurnalis yang tidak manusiawi yang hanya menerima Php 4.000,00 sebulan atau Php 100,00 sehari. Selain pendapatan secara ekonomi lemah, keamanan hukum jurnalis juga

masih belum mencapai status aman. (Philippine Press Institute, 2022) Dalam jurnal lain berjudul “Watching Over the Watchdogs: “The problems that Filipino journalists face” dari Nanyang Technological University, berdasarkan survei terhadap 349 jurnalis Filipina, studi ini menemukan bahwa jurnalis di Filipina kerap mengeluhkan kekerasan media, akses informasi, profesionalisme dan gaji yang rendah. Banyak wartawan cenderung mengidentifikasi gaji rendah sebagai masalah yang paling penting selain perlindungan terhadap hukum.

Perlindungan hukum yang ada dinilai telah gagal mencegah atau menghukum kekerasan terhadap jurnalis, yang menyebabkan iklim impunitas yang mengakar. Pembantaian Maguindanao sebagai salah satu contoh kegagalan tersebut, dimana berlanjut saat proses hukumnya masih dibalut dengan sederet pelanggaran. Secara terpisah, pada bulan September 2010, proses persidangan dimulai untuk beberapa terdakwa dalam kasus pembantaian tahun 2009 yang diduga dilakukan oleh orang yang berkuasa. Proses tersebut menampilkan kekerasan intimidasi saksi serta pembunuhan sejumlah saksi, dan hanya sebagian kecil dari 197 tersangka yang telah diadili. Atas lingkungan yang tidak kondusif, menjadikan beberapa rekan jurnalis harus menempuh jalur lain dengan ekspektasi merepoleh situasi kerja yang lebih aman. Tingkat kepercayaan jurnalis pada institusi dan lembaga pemerintah relatif rendah adalah efek yang tak terelakan dari situasi ini.

BAB III

ANALISIS KEKERASAN DAN PEMETAAN KEKERASAN STRUKTURAL TERHADAP JURNALIS FILIPINA

Pada bab sebelumnya telah diuraikan mulai dari posisi media dalam politik, rangkaian kasus – kasus kekerasan dan juga faktor yang menjadikan jurnalis rentan akan kekerasan. Yang mana dari data tersebut akan dirangkai dalam bentuk analisa menggunakan teori kekerasan Johan Galtung. Di mulai dari sub-bab pertama yang akan menjelaskan bagaimana impunitas dan vigilantisme menjadi budaya kekerasan jurnalis dari aspek kekerasan kultural yakni, ilmu pengetahuan empiris dan kosmologi. Kemudian akan disambung dengan pemetaan bagaimana kekerasan struktural yang dijalankan hingga akhirnya membangun pengertian tentang kekerasan. Pembuatan bagan didasari dari konsep kekerasan struktural tentang penggunaan kekuasaan. Kemudian sub-bab ketiga adalah untuk menerapkan topologi kekerasan pada studi kasus berdasarkan data yang telah diperoleh. Kemudian bagian keempat menjelaskan tindakan – tindakan nyata yang terjadi sebagai perampasan kebebasan dimana ini termasuk dalam kebutuhan mendasar.

3.1 Impunitas dan Vigilantisme Polisi

Kehadiran impunitas seringkali merupakan hasil dari realisasi yang sinis sistem demokrasi dalam negara dan masyarakat. (McSherry, 1992) Dalam kasus Filipina, itu manipulasi oleh pemerintah dengan ilusi harapan rakyat bahwa “perdamaian dan keadilan bisa tercapai”. Impunitas bagian dari doktrin yang melanggengkan kekuatan militer, atau kelas penguasa yang merugikan sistem demokrasi dalam negara dan masyarakat. Ini menjadi garis bawah mengapa polisi setelah mendapatkan “lampu hijau” sederhana dari Presiden, main hakim sendiri dan pada dasarnya menjadi organisasi main hakim sendiri. Ia dengan kuasa tersebut mengambil peran polisi, jaksa, hakim dan algojo pada saat yang bersamaan. Kondisi yang mempertahankan kekerasan sebagai alternatif dalam memperoleh banyak ‘ketertiban’ melalui ancaman kekerasan personal juga didukung oleh kekerasan struktural. (Galtung, Violence, Peace and Peace Research, 1969)

Penelitian tentang main hakim sendiri umumnya dikaitkan dengan penegakan kontrol sosial komunitas oleh aktor-aktor sosial yang mungkin terkait atau tidak terkait dengan negara, seperti komunitas yang main hakim sendiri, milisi sipil, atau anggota regu pembunuh. Partisipasi polisi sebagian besar bertumpu pada penyangkalan. Polisi tidak dapat diidentifikasi sebagai pelaku tindakan kekerasan dan karena itu tidak dapat mengambil pujian atas “kesuksesan” mereka. (Kreuzer, 2022) Sehingga, suksesnya regu pembunuh dalam mengaksekusi pelaku kriminal tidak bisa secara etis disebut sebagai sebuah

keberhasilan. Peran polisi sendiri dalam bentuk pengendalian kejahatan di luar hukum ini tidak dapat dikategorikan sebuah tindakan secara resmi sekaligus citra diri yang rusak tidak dapat diperbaiki.

Polisi dapat menyebut pembunuhan tersebut sebagai pengendalian kejahatan yang berhasil, atau setidaknya mereka mencitrakannya demikian. Dengan cara ini upaya untuk menutupi kualitas main hakim sendiri mereka dapat terjaga selama mereka mendapat dukungan dari publik dan elit mapan untuk pemingkai ini. Dengan demikian, membingkai pembunuhan di luar hukum sebagai pembelaan diri dalam konteks pertemuan bersenjata yang sedang bertugas memungkinkan pembentukan kembali polisi sebagai penjaga perdamaian dan ketertiban masyarakat yang berhasil dan memberikan jalan keluar dari ketidakmampuan mereka untuk berhasil memerangi kejahatan sambil menegakkan supremasi hukum.

Penertiban masyarakat dengan strategi main hakim serta budaya impunitas menjadi sorotan di Filipina. Terlebih dalam proses hukum yang tidak maksimal, ini akan relevan dengan data UNESCO, tercatat dari 2006-2022 bahwa setidaknya masih ada 81,7% kasus pembunuhan jurnalis Filipina yang berstatus *Ongoing/Unsolved*. Ketidakmampuan untuk membawa tersangka ke pengadilan dan mengakibatkan kerusakan pada citra diri polisi sebagai penjaga perdamaian dan ketertiban yang kuat mendorong kegiatan main hakim sendiri oleh polisi di mana ada lingkungan politik dan sosial yang melegitimasi strategi pengendalian kejahatan dengan kekerasan semacam itu.

Sebelum Duterte, polisi jarang berhasil menangkap penjahat dan mengumpulkan cukup bukti untuk penuntutan yang sesuai. Duterte mengisyaratkan untuk membunuh tersangka jika mereka menolak, memberikan cara yang kooperatif, sebagai alternatif untuk mengumumkan kesuksesan menjalankan keadilan. Sebelum Duterte, tingkat hukuman untuk semua kasus kriminal yang sampai ke pengadilan kurang dari 20%. Dari kasus kekerasan, pembunuhan, perkosaan atau perampokan, kurang dari 30% berhasil sampai ke pengadilan dan kurang dari 30% ini menghasilkan putusan, yang berarti bahwa kurang dari 10% kasus yang dilaporkan oleh polisi akhirnya berujung pada putusan. Misalnya, setiap tahun sebelum 2016, ada lebih dari 9.000 kasus pembunuhan yang mana bagian dari retorika kebijakan Perang Melawan Narkoba semakin tak terkendali.. Namun, pada tahun 2016 hanya 2.700 yang berhasil sampai ke pengadilan, menghasilkan 695 hukuman. (Kreuzer, 2022, 6)

Tindakan main hakim sendiri atau disebut vigilantism ini lebih jauh dipahami sebagai warisan budaya politik. Duterte merealisasikan melalui kampanye yang meminta Kepolisian Nasional Filipina untuk menargetkan tersangka pengguna narkoba dan pengedar narkoba dengan kekerasan di luar hukum, yang dapat dianggap menghasut penegak hukum untuk melakukan pembunuhan. Human Rights Watch telah mengubah narasi resmi, dimana data yang dihimpun bahwa banyak dari 3.271 pembunuhan oleh polisi dikaitkan dengan “main hakim sendiri” dan geng narkoba adalah kedok untuk melindungi

diri mereka sendiri dan agen polisi dari kesalahan dalam eksekusi di luar hukum dengan gaya regu kematian. (Kine, 2017)

Banyak dari eksekusi dilakukan di luar hukum, kebanyakan ditujukan pada perwakilan aktivis sayap kiri. Korban lain dari pembunuhan semacam itu adalah jurnalis, yang mengkritik berbagai keluhan lokal dan mungkin menggali terlalu dalam intrik dan siasat politik. Juga harus disebutkan tentang meningkatnya jumlah hakim yang dibunuh oleh para pembunuh. Di sejumlah kota, tersangka kriminal telah dibunuh oleh penyerang tak dikenal dalam 'gaya pasukan maut'. Salah satu fenomena paling menonjol saat ini adalah banyaknya organisasi vigilante yang muncul dalam waktu beberapa bulan terutama di tahun-tahun politik. Para penjaga awalnya berkembang sebagai reaksi lokal terhadap kekerasan yang semakin membabi buta dari unit Sparrow dan meningkatnya kriminalitas di sejumlah kota. Berbagai jenis organisasi main hakim sendiri yang terkait dengan kontra-pemberontakan memberikan latar belakang penting dari perkembangan dramatis tahun-tahun awal pemerintahan demokratis di dalam dan setelah 1986.

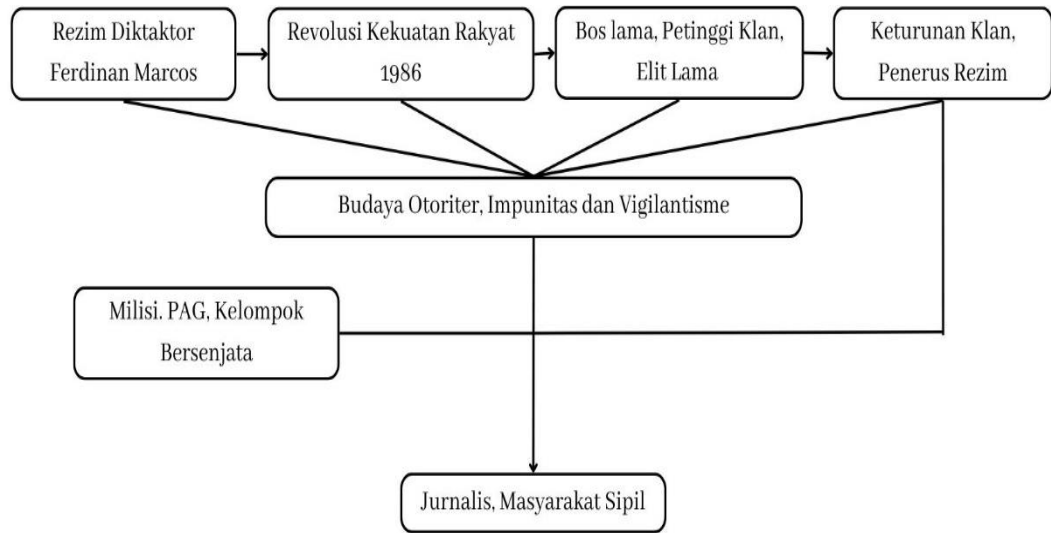
Impunitas dan Vigilantisme di Filipina menjadi warisan budaya politik yang semakin memelihara kekerasan. Doktrin yang tertimbun mengubah kode genetik budaya serta merekayasa untuk akhirnya menjadi hak istimewa bagi yang berkuasa. Dalam 7 aspek kekerasan kultural, ini merupakan bagian dari aspek Kosmologi. Dengan membingkai situasi politik dan kekerasan yang mengarah pada rasa putus asa. (Galtung, Cultural Violence, 1990) Impunitas meningkatkan pembunuhan di luar hukum dan penangkapan sewenang-wenang telah menjadi

sangat mengancam hak sipil termasuk sebagai alat untuk membungkam kritik. Menciptakan asumsi bahwa impunitas melakukan pemeliharaan terhadap pembiaran setiap tindak kekerasan, dimana ini merupakan kode genetik budaya yang sengaja diciptakan untuk membangun pengertian akan penggunaan kekerasan serta bagaimana kekerasan menjadi bagian dari struktural politik.

3.2 Bagaimana Filipina Memahami Kekerasan

Pengelompokan sederhana antara kekerasan yang bersifat “Visible” dan kekerasan yang bersifat “Invisible” sebagai instrumen dasar analisa untuk mengidentifikasi serta memahami konflik. Impunitas di Filipina mencakupi kejahatan terhadap jurnalis dimana kekerasan dan dikriminalisasi atas berita yang mereka buat masih lekat dengan pekerjaan tersebut. Kekerasan kultural dan struktural langsung mengarah pada kekerasan. Jenis kekerasan langsung berangkat dari kekerasan struktural dan kultural, dimana semua jenis kekerasan politik swasta yang dibahas selama ini memiliki kaitan langsung dengan elit politik di tingkat lokal. Baik secara langsung terikat pada mereka atau mereka dapat dengan mudah diperalat untuk bekerja demi kepentingan elit politik. Aturan bos pada gilirannya didasarkan pada tingkat paksaan yang signifikan, diwacanakan pada praktik impunitas dan sulit untuk berkompromi dengan sejarah politik di sana.

Gambar 7. Skema Sederhana Budaya Kekerasan Filipina



Sumber The Emergence of the Philippine "Anti-Media" (Beltran, 2017)

Ketiadaan sama sekali untuk berdamai dengan masa lalu dan impunitas saat ini muncul karena revolusi Kekuatan Rakyat tahun 1986 bukanlah sebuah revolusi tetapi pemulihan kekuasaan sebelum darurat militer dari bos-bos bertopeng yang demokratis, yang terus-menerus beradaptasi dengan perubahan lingkungan. (Kreuzer, 2009) Untuk menegakkan kekuasaan mereka, bos lama yang kembali, serta keturunan mereka dan sejumlah orang kuat baru, terus memerintah dengan aturan bos yang dilegitimasi secara demokratis. Mereka terus menggunakan instrumen kekerasan pribadi dan semi pribadi yang sama yang telah menjadi ciri politik Filipina selama beberapa dekade sebelumnya. Kekerasan pribadi yang digunakan untuk tujuan politik tidak pernah merupakan penyimpangan dari pemerintahan yang demokratis, tetapi unsur penting dari

demokrasi elektoral yang dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut di Filipina selama abad sebelumnya.

Kekerasan yang diterapkan kian bertransformasi menjadi semakin modern. Kekerasan adalah bagian dari warisan dalam panggung politik Filipina, dimana kelompok swasta punya kapasitas menjadi agen-agen kekerasan di berbagai wilayah negara. Sebagian besar kekerasan main hakim sendiri tampaknya dilakukan secara acak, bertujuan untuk menyebarkan ketakutan dan teror. Namun, sebagian besar kekerasan ditujukan pada orang-orang yang diyakini sebagai simpatisan kiri, atau aktivis dari berbagai organisasi yang bertujuan mengangkat orang miskin dan terpinggirkan. Dalam hal ini kekerasan menjadi instrumen untuk mengontrol dimana ini menunjukkan keterkaitan antara kekerasan dengan kekuasaan.

Presiden Rodrigo Duterte pada kampanye untuk memerangi peredaran narkoba serta kejahatan sejenisnya telah menyebabkan kematian lebih dari 12.000 orang Filipina. (Conde, 2019) Presiden Duterte populer dengan tekadnya untuk melawan kejahatan. Dalam simbolisme politiknya, Duterte jelas berada di atas hukum. Dialah yang mendakwa, menghakimi, dan memerintahkan algojo untuk melakukan tugasnya. Ini adalah pertarungan pribadi antara mereka yang tidak mengikuti aturan dan main hakim sendiri yang sah yang aturannya berkuasa. Ini adalah aturan bos dalam bentuk murni. Keamanan yang diciptakan bersumber dari gagasan pribadinya tentang keadilan dan kecukupan. (Kreuzer, 2009)

Fakta bahwa negara telah digunakan secara efektif untuk memajukan kepentingan elit penguasa tidak sama dengan mengatakan bahwa Filipina adalah negara yang lemah. Negara Filipina sebenarnya cukup kuat di sejumlah bidang yang disukai kepentingan kelas penguasa dan lemah di bidang lain. Dan kelemahannya, seperti dikemukakan di atas yakni terkait langsung dengan kebutuhan elit lokal. Ini juga berlaku pada level kekuasaan swasta di mana mereka secara terbuka mengelola kekerasan dalam politik yang diprivatisasi atau privatisasi untuk mempertahankan posisi mereka.

Sebagian besar kekerasan main hakim sendiri tampaknya dilakukan secara acak, bertujuan untuk menyebarkan ketakutan dan teror. Namun, sebagian besar kekerasan ditujukan pada orang-orang yang diyakini sebagai simpatisan kiri, atau aktivis dari berbagai organisasi yang bertujuan mengadvokasi orang miskin dan terpinggirkan. Modus demikian dapat memperoleh pasokan persenjataan seiring meluasnya keberadaan dan penggunaan kelompok bersenjata untuk melayani bos individu atau keluarga politik. Belum lagi adanya pelibatan polisi dalam beberapa kasus di Filipina berfungsi sebagai perwakilan bersenjata, oknum yang berperan sebagai penegak kepentingan elit lokal secara terstruktur. Selama dasawarsa terakhir, perjanjian perdamaian telah menjadi fenomena massa yang sangat diritualkan, bagian rutin dari kampanye pemilu, umumnya didahului dengan apa yang disebut “perjalanan persatuan”. Namun lonjakan kekerasan terkait pemilu atau ERV (*Election-Related Violence*) masih rawan terjadi di wilayah seperti Metro Manila, Mindanao Barat, Lanao del Sur, Lanao, Visayas

Tengah, Visayas Timur, Luzon Selatan, Luzon Tengah, dan Luzon Utara. (Deinla et al., 2022)

Semua jenis kekerasan politik swasta yang dibahas selama ini memiliki kaitan langsung dengan elit politik di tingkat lokal. Mereka baik secara langsung terikat pada mereka atau mereka dimaksudkan sebagai alat dan sarana demi kepentingan para politisi. Singkatnya, jurnalis lokal ialah bagian dari sejumlah besar eksekusi di luar hukum yang kebanyakan ditujukan pada perwakilan aktivis sayap kiri. Korban lain dari pembunuhan semacam itu adalah jurnalis, yang mengkritik berbagai keluhan lokal dan mungkin menggali terlalu dalam intrik bos lokal yang kuat. Sejarah Filipina adalah sejarah pemerintahan bos. Asumsi bahwa sistem ini entah bagaimana membutuhkan kekerasan agar tetap sejalan salah satunya dari variasi struktural.

Argumennya adalah bahwa jika tidak ada kekerasan pribadi atau ancaman kekerasan pribadi maka sistem politis yang sangat kuat diperlukan untuk menjaga ketertiban dan mengendalikan konflik, dan jika tidak ada kekerasan struktural atau ancaman kekerasan struktural, maka akan muncul alternatif kekerasan lain. Galtung dalam teorinya juga menambahkan kekerasan tak dapat menjadi alternatif ketertiban, ia akan berhenti hanya jika ada keputusan sadar untuk berhenti melakukannya. (Galtung, Violence, Peace and Peace Research, 1969) Aturan bos terus berlarut mempertahankan sistem ini, termasuk untuk menghambat jalannya peradilan pembantaian Maguindanao 2009. Aturan bos pada gilirannya didasarkan pada tingkat paksaan yang signifikan.

3.3 Kekerasan dan Kekuasaan (Mencederai Kebutuhan atas Hidup dan Kebutuhan atas Kebebasan)

Aturan bos menciptakan arus kekerasan struktural yang menghambat kesadaran aktual manusia dengan kesadaran potensial mereka. (Vorobej, 2008)

Ini adalah konsep kekerasan struktural Galtung dimana itu terjadi saat masyarakat menikmati kesempatan hidup yang tidak sama satu kelompok dengan kelompok yang lain, dimana kelompok yang lebih rendah mengalami ketidakberuntungan. Ini juga dijelaskan dalam topologi kekerasan, dimana terdapat 4 kebutuhan yang harus terpenuhi. Pada kasus kekerasan politik yang hingga mengalami penghilangan nyawa bisa digolongkan dalam Exploitation A akibat dilakukan pembiaran serta adanya campur tangan pemerintah. Singkatnya, eksploitasi dan represi berjalan beriringan, sebagai kekerasan tetapi keduanya tidak identik. (Galtung, Cultural Violence, 1990)

Topologi kekerasan dalam kebutuhan akan kebebasan sangat relevan dengan kondisi jurnalis Filipina. Pasalnya dari data yang telah dihimpun diatas, meninjau dari serangkaian narasi, sejarah, faktor – faktor lain yang kian meminggirkan jurnalis dari pergaulan, adalah merupakan marginalisasi. Menjaga kelompok jurnalis untuk tetap menjadi '*underdog*' yang diluar dan didukung dengan fragmentasi yakni menjauhkan antar sesama jurnalis melalui narasi provokatif serta pembungkaman media. Istilah underdog adalah sebuah belunggu. Secara tidak langsung jurnalis mengalami penindasan, karena definisinya

kebebasan adalah ‘bebas dari’ dan ‘bebas untuk’. (Galtung, *Cultural Violence*, 1990)

Terkadang kekerasan telah menjadi perpanjangan dari kontrol media negara di mana kekerasan pada pekerja media sebagai bentuk penyensoran lainnya. (Nerone, 2021) Kekerasan struktural terpelihara dan terpupuk oleh budaya impunitas dan budaya aksi main hakim yang kemudian melahirkan kekerasan fisik, Meskipun kekerasan secara umum telah ada di mana-mana, praktik-praktik kekerasan mengalami transformasi, serta perubahan dalam peran sosial dan politik masyarakat. Dalam kasus jurnalis Filipina, ini melibatkan konflik yang tidak hanya bersifat politis namun juga personal. Kekerasan telah beralih fungsi untuk bereaksi terhadap anggapan penghinaan terhadap kehormatan atau reputasi. Karena fenomena ini sangat beragam dan berubah-ubah, ada gunanya membedakan berbagai bentuk umum kekerasan terhadap jurnalis. Ini khususnya terjadi dalam sistem otoriter, di mana kekerasan melengkapi bentuk penyensoran lainnya. Di sisi lain, sering kali ini merupakan cara untuk menentang otoritas negara, dan hal itu dapat diucapkan secara khusus dalam sistem pasca-otoriter dengan kapasitas terbatas untuk melindungi jurnalis independen oleh negara.

Keamanan jurnalis Filipina dalam bertugas secara profesional ditinjau dari aspek sosial politiknya relatif tidak stabil. Iklim pekerja media yang ramah akan kekerasan serta memarginalkan kelompok dalam politik disana dipengaruhi oleh kondisi struktural birokrasi. Galtung mengembangkan pembedaan dimana kekerasan langsung pada jurnalis adalah sebuah peristiwa sedangkan kekerasan

struktural ialah sebuah bagian dari proses yang tergambar pada konflik. Berdasar pada data di bab sebelumnya, terdapat klausul satu arah yang diterapkan untuk setidaknya membuat pekerjaan jurnalisisme disana cenderung dan sangat rentan atas bahaya kekerasan fisik.

Pembantaian Maguindanao menyisakan peradilan yang bertele-tele. Persidangan telah melibatkan banyak saksi sejak awal, namun menjadi jelas bahwa roda keadilan di pengadilan Filipina yang terkenal kekurangan dana akan berjalan sangat lambat. Dari 115 orang yang ditangkap, hanya 103 orang yang diadili. Klaim tersebut bukannya tidak berdasar, di bawah pemerintahan Duterte juga banyak dari jurnalis telah tersapu dalam penumpasan brutal terhadap kejahatan narkoba. Pembunuhan di luar hukum sebagian didorong oleh presiden, yang secara terbuka membual tentang pembunuhan. (Wiseman, 2019)

Meskipun pekerja media profesional terlindungi secara hukum dan undang - undang, namun dalam realisasi mereka melanggengkan bentuk budaya lingkungan kerja yang tidak aman. Seperti halnya narasi - narasi profokatif yang ditujukan pada jurnalis, kondisi sosial politik yang dimanipulasi, kepentingan kelompok elit serta implementasi penegakan dan hak hukum jurnalis yang belum maksimal. Sistem keluarga dan klan yang banyak berlaku di region utama di Filipina tak jarang menjadi akar dari konflik yang mana juga berdampak pada keselamatan jurnalis yang akan dimanfaatkan sebagai alat publikasi atas satu kepentingan kelompok.

Fenomena ini berkaitan dengan kekerasan dan kekuasaan yang masih dalam satu bingkai pada studi perdamaian dan konflik. Johan Galtung menjelaskan selain dari metafora segitiga penyebab kekerasan, ada kekuasaan sebagai elemen sentral dimana kekuatan material yang terkait dengan kontrol atas produksi dan distribusi sumber daya dan kekuatan fisik untuk menyebabkan kerusakan melalui kekerasan langsung. Kekerasan jurnalis terutama struktural di Filipina selalu berlatarbelakang dari relasi kekuasaan rezim yang menjabat. Konteks pemaksaan tak dapat terhindarkan dari praktiknya, dimana rezim sebagai atas dasar hegemoninya selalu mencapai perannya dalam cakupan yang lebih luas.

Perlu dipahami bahwa pemaksaan ini muncul lebih lanjut tidak harus mencakup fisik. Status jurnalis Filipina dengan independensi yang dalam hal tertentu berada pada kontrol aktor lain tak luput dari paksaan non fisik. Di samping narasi konfrontatif yang tak jarang dilontarkan, upah yang rendah membuat peluang mereka dapat diperalat secara politik lebih tinggi. Logika sederhana yang berkaitan dengan kekuatan politik dengan ekonomi, ketika kekuatan ekonomi dan politik rendah memproduksi probabilitas pertukaran modal budaya sebagai aspek kunci dari dominasi kelas kelompok yang lebih superior. (Rahardjo, 2000) Dalam hal ini, faktor kekuasaan yang solid menjadi landasan utama segala bentuk tindak kekerasan. Kekuasaan sebagai alasan rasional dalam permasalahan struktural sebelum menjangkau tindakan - tindakan yang lebih realistik.

3.4 Kekerasan Langsung (Direct Violence)

Kekerasan fisik atau verbal secara langsung merupakan manifestasi langsung dari adanya kekerasan budaya dan kekerasan struktural. Direct Violence, merupakan bentuk kekerasan langsung yang dilakukan oleh aktor tersebut. Dampak kekerasan ini terlihat dari sisi fisik maupun psikologisnya, dimana ada pelaku dan korban. Model kekerasan seperti ini yang biasanya diartikan dengan “kekerasan” pada umumnya. Seperti misalnya, penyiksaan, pembunuhan, penganiyaan fisik maupun mental, penghinaan, diskriminasi personal, bullying, dll. Kekerasan langsung dilihat sebagai indikator aktual untuk menilai situasi politik di Filipina.

Galtung juga menjelaskan bentuk kekerasan langsung, yaitu ketika tujuan untuk melakukan realisasi tidak dilakukan namun dirusak. Ketika terjadi peperangan, terjadi kekerasan langsung dimana pembunuhan atau pencideraan seseorang dipastikan menempatkan realisasi somatis aktual. (Galtung, Cultural Violence, 1990) Situasi politik Filipina yang masih akrab dengan kekerasan, adalah akar dari upaya kepentingan yang harus berbenturan dengan pihak lain seperti jurnalis. Maka realisasi dari produk media dinilai rusak oleh kelompok politis tertentu akan melibatkan elemen kekerasan untuk realisasi tujuan. Namun sangat penting bahwa rakyat Filipina memiliki pers kritis yang kuat untuk mempertanyakan pemerintah sampai ke lehernya dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Upaya untuk melarang hak siar media Filipina masuk dalam radar pelanggaran hak asasi manusia. Media seperti Rappler dan ABS-CBN dalam praktiknya menerima efek “Anti-Media” atau setidaknya darurat dari faktor Duterte. Korban terbaru jurnalisme Filipina membingkai satu bentuk kekerasan langsung, sangat penting bahwa rakyat Filipina perlu memiliki pers kritis yang kuat. Namun berita bahwa pemerintah Presiden Duterte yang mencoba melarang situs berita kritis terkemuka Rappler, mencerdai kedaulatan pers secara langsung. Media ABS-CBN tercatat pernah dipaksa untuk tidak mengudara pada tahun 2020, hal yang sama juga pernah terjadi di 1972. Kritikus mengatakan keputusan kongres adalah bukti lain dari gaya pemerintahan otoriter Duterte. Presiden telah dituduh melakukan tindakan keras terhadap para pembangkang, kelompok oposisi dan media independen sejak berkuasa. (Manila, 2020)

Secara umum, sosialisasi kode etik dan protokol keselamatan sudah diberlakukan mulai dari pengetahuan jurnalis mengenai risiko keamanan fisik, digital, psikologis, maupun kekerasan seksual. Namun, pengetahuan jurnalis mengenai protokol keamanan dari tempat kerja relatif rendah. Situasi yang sulit ini, kekerasan langsung didefinisikan sebagai serangan fisik dalam konteks hak-hak media salah satunya untuk bertindak kritis. Efek ini menjadi semakin kompleks ketika kubu “anti-media” muncul dari kelompok pendukung Duterte, yang gencar melakukan aksi kampanye melalui media sosial. Bahkan pada beberapa kasus, adanya seruan untuk mengepung stasiun media GMA News dan kalimat profovokasi untuk menyerang. (Beltran, 2017)

Merujuk pada teori kekerasan Johan Galtung, setiap pihak memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda dan persepsi yang bertentangan. Oleh karena itu mereka mungkin menghubungkan konflik dengan sebab-sebab yang berbeda. Konflik ditunjukkan pada fenomena berbagai kekerasan terhadap jurnalis ini merupakan noda hitam yang sulit dihilangkan dari sejarah Filipina. Berbagai kejadian tersebut menandakan bahwa jurnalis Filipina hidup di bawah ancaman teror. Berbagai kelompok mafia politik bisa bertindak dengan bebas dan berani dalam mengancam, bahkan membunuh jurnalis. Kontestasi pemilu lokal dan nasional mengungkapkan keterbatasan itu dalam hal prioritas keamanan semua elemen terlibat. Ada sekitar 70 yang tewas terbunuh selama pemilihan terjadi. Kemudian, hanya dua bulan setelah pemilu sela, sebuah skandal besar melibatkan skema penipuan penyalahgunaan dana publik terungkap ke publik, juga dikenal sebagai "pork barrel". (BUI & BACHA, 2018)

Tragedi Maguindanao yang terjadi merupakan salah satu dari sekian rentetan kasus kekerasan yang terjadi. Melihat dari data jumlah kekerasan yang ditujukan pada jurnalis pasca kejadian tersebut tidak ditemukan regulasi signifikan. Tragedi berdarah tersebut dapat dikatakan masih gagal bagi Filipina untuk menjadi titik balik revolusi jurnalisisme yang lebih sehat. Pembunuhan, impunitas, dan kurangnya perlindungan masih berulang hingga kini meski dari sejarah runtuhnya rezim Marcos telah menjadi titik balik upaya pengembalian demokrasi juga kebebasan berpendapat.

Bila dikonversikan dalam skema segitiga kekerasan galtung, maka sederet tindak kekerasan diatas akan berada dalam area yang terlihat/visible. Karena ini kekerasan yang menyerang fisik dalam bentuk pemukulan, pembunuhan, pemerkosaan, bahkan hinaan verbal terhadap suatu individu atau kelompok. Kekerasan secara langsung ini dapat digabungkan dengan tingkah laku yang merugikan atau mengancam suatu target. Jurnalis dalam hal ini menjadi korban rugi dari sederet tindak kekerasan dipangung politik Sedangkan dalam segitiga kekerasan di tiap sudut yang unvisible/tidak terlihat akan diisi oleh impunitas, vigilantisme, narasi profokatif dan framing pemerintah terhadap jurnalis.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Teori kekerasan struktural Johan Galtung dapat menjelaskan situasi sosial politik jurnalisme di Filipina. Kekerasan yang terjadi tak luput dari peranan pemerintah dan rezim yang berkuasa yang dalam hal ini masih menyisipkan kepentingan-kepentingan kelompok. Ini dipengaruhi budaya politik yang sarat akan peranan dinasti klan, keluarga serta kelompok politik yang lebih lokal. Tragedi Maguindanao menjadi potret besar tentang bagaimana segala elemen kekerasan menyatu dalam satu peristiwa, dimana latar belakangnya terdapat peranan klan kaya raya di wilayah Maguindanao, Klan Ampatuan.

Pasca kejadian tersebut, Filipina masih belum bisa keluar dari jerat peristiwa kekerasan pada jurnalis berikutnya. Kekerasan langsung yang dialami seperti pembunuhan, penangkapan dan pemenjaraan berakar dari masalah struktural yang jauh lebih besar. Iklim politik yang sangat rentan akan kekerasan, dipengaruhi oleh salah satunya narasi permusuhan yang pernah dilontarkan rezim pemerintah. Lemahnya proses advokasi hukum untuk jurnalis disana semakin membuat posisi jurnalis menjadi sasaran lunak, ini dibuktikan dari beberapa gugatan kasus peradilan yang tidak terselesaikan. Termasuk munculnya kampanye penolakan untuk Rappler, ABS-CBN dan GMA News. Pasca Tragedi Maguindanao, beberapa media disudutkan untuk diboikot bahkan juga serangan

fisik. Teori kekerasan struktural mampu memetakan bagaimana kekerasan ini terpelihara oleh sistem yang memarginalkan kelompok jurnalis. Peradilan Maguindanao yang mundur dari estimasi juga dipengaruhi hegemoni bos dan klan. Namun, lagi – lagi pengaruh sejarah impunitas dan vigilantisme dan otoriter membentuk perpektif yang akhirnya mencederai jurnalis dari segi kebutuhan atas hidup dan kebutuhan atas kebebasan mereka.

Ini mengkonfirmasi bahwa hipotesa soal adanya faktor struktural dan sejarah yang akhirnya membawa kondisi jurnalisme Filipina sedemikian berbahaya. Budaya kekerasan yang dibawa sejak lama, impunitas dan vigilantisme merupakan produk dari kekerasan struktural yang semakin mensuplai kekerasan langsung disana. Kondisi ini melibatkan banyak aktor yang pada bab sebelumnya, serangkaian faktor mempengaruhi proses relasi jurnalis dengan pekerjaannya yang sedemikian rentan pada kekerasan. Lemahnya advokasi hak pekerja, upah yang relatif rendah serta politik dinasti berkontribusi pada fenomena konflik yang lebih besar.

4.2 Rekomendasi

Dari penjelasan di atas, pengetahuan jurnalis dalam melihat risiko keamanan dan perlindungan perusahaan media penting untuk ditingkatkan, seiring dengan adanya langkah nyata dalam memerangi budaya impunitas terhadap jurnalis. Dengan demikian, beberapa tahun ke depan harus tentang penguatan kapasitas lembaga penegak hukum untuk berhasil mengatasi kejahatan dengan cara yang sehat secara hukum dan, pada saat yang sama, menetapkan norma fundamental bahwa perintah ilegal tidak boleh diikuti. Untuk memutus rantai kekerasan di kontestasi politik Filipina perlu langkah yang kritis.

Konstitusi yang memiliki kesamaan dengan negara Indonesia serta birokrasi jurnalisme yang tak jauh berbeda. Selain pemeriksaan ulang yang ketat terhadap konvensi media seperti yang telah ditafsirkan dalam praktiknya. Apa yang dapat membantu mengakhiri keadaan jurnalisme Filipina yang menyedihkan ini adalah penghentian, atau pengurangan, jumlah jurnalis yang dibunuh melalui demonstrasi yang jelas bahwa keduanya para pembunuh dan dalangnya akan diidentifikasi, ditemukan, diadili, dan dihukum. Maka diperlukan adanya regulasi dan kebijakan khusus untuk penyegaran ulang terutama untuk menekan angka peluang impunitas dan vigilantisme di negara tersebut. Penelitian ini dapat dikembangkan kembali

DAFTAR PUSTAKA

- Akoijam, B. (2012, July 30). *Understanding Violence Triangle and Structural Violence – KanglaOnline*. Retrieved March 11, 2023, from KanglaOnline: <https://kanglaonline.com/2012/07/understanding-violence-triangle-and-structural-violence-by-rajkumar-bobichand/>
- ALCED. (2019, May 10). *Midterm Elections in the Philippines: Power Consolidation at Its Finest*. Retrieved May 19, 2023, from ACLED: <https://acleddata.com/2019/05/10/midterm-elections-in-the-philippines-power-consolidation-at-its-finest/>
- Beltran, J. V. (2017). The Emergence of the Philippine "Anti-Media" : the Duterte Factor. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(1), 61-74. doi:10.24002/jik.v14i1.833
- BUI, & BACHA. (2018, April 23). CULTURE OF IMPUNITY IN THE PHILIPPINES.
- Cahyokusumo, R. D. (2021, January 11). *Mengenal Pola Segitiga Konflik & Kekerasan Johan Galtung*. Retrieved February 22, 2023, from ARTIKULA.ID: <https://artikula.id/dimassigitcahyo/mengenal-pola-segitiga-konflik-kekerasan-johan-galtung/>
- Combinido, P., & Brophy, C. (2019, March 5). *Campaigning and killing: violence against politicians in the Southern Philippines*. Retrieved May 17, 2023, from New Mandala: <https://www.newmandala.org/campaigning-and-killing-violence-against-politicians-in-the-southern-philippines/>
- Conde, C. H. (2018, April 30). *Serangan Tanpa Henti Terhadap Pers Filipina*. Retrieved January 31, 2023, from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/id/news/2018/04/30/317453>

- Conde, C. H. (2019). *Philippines' 'War on Drugs'*. Retrieved March 29, 2023, from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/tag/philippines-war-drugs>
- Deinla, I., Ballar, K. J., Refani, R. P., & Yap, J. (2022, February 17). Election-Related Violence in the Philippines: Trends, Targets, and Perpetrators. *ASOG WORKING PAPER 22-005*.
- Freedom House. (2022, August 10). *Freedom of the Press 2017 - Philippines*. Retrieved January 31, 2023, from Freedom House: <https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2017/philippines>
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 181. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/422690>
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/423472> .
- Gregorio, X., & Santos, E. (2019, Desember). *Everything you need to know about the Maguindanao massacre*. Retrieved from CNN Philippines: <https://www.cnnphilippines.com/news/2019/12/18/maguindanao-massacre-what-you-need-to-know.html>
- Kine, P. (2017, April 19). *The Philippines' Duterte Incites Vigilante Violence*. Retrieved May 19, 2023, from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2017/04/19/philippines-duterte-incites-vigilante-violence>
- Kreuzer, P. (2009). Private Political Violence and Boss-Rule in the Philippines. *Behemoth. A Journal on Civilisation*, 1, 47-63.
- Kreuzer, P. (2022, 6). Impunity and Police Vigilantism. *Is the highly excessive use of deadly force by the police in the Philippines now over?, PRIF Spotlight*.

- Manila, A. P. (2020, 07 10). *Deutsche Welle*. Retrieved from Deutsche Welle:
<https://www.dw.com/en/philippines-did-president-duterte-target-abs-cbn-news-network/a-54130115>
- Montemar, L. (2022, August 20). *The TV5-ABS-CBN deal and what media should be all about*. Retrieved December 22, 2022, from Philippine Star:
<https://www.philstar.com/news-commentary/2022/08/20/2203913/tv5-abs-cbn-deal-and-what-media-should-be-all-about>
- Montemar, L. (2022, August 20). *The TV5-ABS-CBN deal and what media should be all about*. Retrieved January 31, 2023, from Philippine Star:
<https://www.philstar.com/news-commentary/2022/08/20/2203913/tv5-abs-cbn-deal-and-what-media-should-be-all-about>
- Nerone, J. (2021). *Violence Against Journalist. obo in Communication*.
- NUJP. (2022, July 8). *Journalism is not terrorism!* Retrieved January 31, 2023, from National Union of Journalists of the Philippines:
<https://nujp.org/statement/journalism-is-not-terrorism/>
- Perez, A. (2009, November). *GMA*. Retrieved from GMA NEWS ONLINE:
<https://www.gmanetwork.com/news/topstories/specialreports/177821/the-ampatuan-massacre-a-map-and-timeline/story/>
- Perry, C. (1970). Violence-Visible and Invisible. *Ethics*, 81(1), 1-21. Retrieved from
<http://www.jstor.org/stable/2380013>
- Philippine Press Institute. (2022, March 25). *Election Violence in the Philippines*. Retrieved January 31, 2023, from Philippine Press Institute:
<https://philpressinstitute.net/election-violence-in-the-philippines/>

- Philippine Press Institute. (2022, June 26). *Future of journalism*. Retrieved January 31, 2023, from Philippine Press Institute: <https://philpressinstitute.net/future-of-journalism/>
- Rahardjo, M. (2000). Kekerasan dan Kekuasaan dalam Praksis Berbahasa: Memahami Kekerasan dalam Perspektif Galtung. *Kekerasan dan Kekuasaan dalam Praktis Berbahasa*, 2(2).
- San, M. (2018, April 27). *PH lawmakers seek to ban reporters who 'besmirch' them*. Retrieved January 31, 2023, from Rappler: <https://www.rappler.com/nation/201170-batasan-house-representatives-new-media-rules/>
- Subingsubing, K., & Santos, T. G. (2022, November 4). *PH still among most dangerous countries for journalists*. Retrieved March 8, 2023, from Inquirer.net: <https://newsinfo.inquirer.net/1689131/ph-still-among-the-most-dangerous-countries-for-journalists>
- Tandoc Jr, E. C. (2016, July 28). *Journalist in the Philippines*. Retrieved January 31, 2023, from Journalists in the Philippines: https://epub.ub.uni-muenchen.de/30119/1/Country_report_Philippines.pdf
- Vitug, M. (2019). The Philippines under Duterte How Journalism, the Judicial System, and Politics have Changed. (G. J. Affairs, Interviewer)
- Vorobej, M. (2008). Structural Violence. *Peace Research*, 40(2), 84-98. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/23607799>
- Wiseman, J. (2019). *Verdict looms 10 years after Philippine press massacre*. Retrieved May 15, 2023, from International Press Institute: <https://ipi.media/verdict-looms-10-years-after-philippine-press-massac>